

PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA CHINA

Totok Minto Laksono¹, Florensia Devina²,
Universitas Hang Tuah Surabaya
totokminto.shmh@gmail.com, florenvina18@gmail.com
*Corresponding author: totokminto.shmh@gmail.com

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted
4 September 2023
Reviewed
17 September 2023
Accepted
20 September 2023
Published
29 September 2023

Di dalam studi Perbandingan Administrasi Negara terkandung aspek yang relevan, yakni aspek Administrasi Negara yang mengandung pengertian umum tentang bagaimana lembaga-lembaga negara tumbuh dan hidup didalam suatu negara menjalankan fungsinya. Administrasi negara bukan merupakan bidang studi yang memiliki pengertian serta sifat yang umum dan berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu bidang studi yang tidak diterapkan di dalam suatu negara dengan multidisipliner. Administrasi negara pada hakikatnya merupakan salah satu aspek dari administrasi yang menekankan pembahasan pada bidang kenegaraan. Berbagai pendapat mengemukakan tentang pengertian atau batasan administrasi yang merupakan induk dari administrasi negara, namun secara umum

dapat diidentifikasi pengertian atau batasan tersebut, mengandung unsur-unsur: unsur proses penyelenggaraan, unsur kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dan unsur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Susunan pemerintahan dapat diartikan sebagai permintaan lengkap yang terdiri dari berbagai bagian pemerintah yang bekerja sama mengandalkan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan unsur-unsur pemerintahan. Terlepas dari kenyataan bahwa sistem pemerintahan masing-masing negara ada kalanya berbeda satu sama lain. Wawasan kita juga bisa dijadikan bahan perbandingan bagi negara kita karena kita akan memperoleh pemahaman tentang sistem pemerintahan negara lain. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui persamaan dan perbedaan antara berbagai sistem pemerintahan, kita dapat merancang sistem yang dianggap lebih unggul.

Kata kunci: pemerintah, perbandingan, administrasi negara

ABSTRACT

In the study of Comparative Public Administration, there is a relevant aspect, namely the aspect of Public Administration which contains a general understanding of how state institutions grow and live in a country carrying out their functions. State administration is not a field of study that has a general understanding and nature and stands alone, but is a field of study that is not applied in a country with multidisciplinary. State administration is essentially one aspect of administration that emphasizes discussion in the field of statehood. Various opinions have suggested the definition or limits of administration which is the parent of state administration, but in general it can be identified that the definition or limits contain elements: elements of the organizing process, elements of cooperation carried out by more than one person and elements of achieving predetermined goals. The structure of government can be interpreted as a complete request consisting of various parts of government that work together relying on and influencing in achieving the objectives and elements of government. Despite the fact that each country's system of government may differ from one another. Our insights can also be used as a comparison for our country because we will gain an understanding of other countries' government systems. Therefore, once we know the similarities and differences between the various systems of government, we can design a system that is considered superior.

Keywords: government, comparison, public administration

PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu organisasi dalam wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang diakui oleh rakyatnya, dimana terbagi atas beberapa unsur yaitu adanya wilayah, adanya pemerintahan, adanya rakyat dan adanya pengakuan/kedaulatan. Sedangkan administrasi adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama dan untuk perbandingan adalah dua hal atau lebih yang di bandingkan dengan hal yang lainnya. Administrasi negara perbandingan merupakan perbandingan administrasi di dua negara atau lebih yang berbeda. Mengingat pula pendekatan terhadap administrasi negara itu berbeda-beda, maka akan melahirkan pandangan yang berbeda pula. Dari perbedaan tersebut maka lahirlah perbandingan. Pada dasarnya perbandingan dilakukan untuk mengetahui berbagai macam organisasi kenegaraan serta kegiatan setiap organisasi dalam mencapai tujuan negaranya. Dapatlah diberikan pengertian ataupun batasan bahwa administrasi negara mengandung suatu pengertian kolektif yang meliputi segenap proses penyelenggaraan negara sebagai suatu organisasi yang meliputi organ/ lembaga berikut fungsi masing-masing yang tumbuh dan hidup dalam suatu negara, dan semuanya itu diarahkan kepada pencapaian tujuan negara yang bersangkutan.

Perbandingan Administrasi Negara adalah ilmu yang baru bila dibandingkan dengan Ilmu Perbandingan Politik yang merupakan ilmu yang ditemukan asalnya pada zaman Aristoteles. Pada masa awalnya, sebelum permulaan abad ke-20 studi Administrasi Negara perbandingan itu terjalin di dalam studi Pemerintahan. Kemudian setelah PD II dengan pernyataan Robert E. Dahl (1947) ilmu ini mulai mendapatkan perhatian dan awal kelahiran Ilmu Administrasi Negara Perbandingan. Konferensi Princeton (1952) membahas lebih lanjut masalah riset dan metode pengajaran yang sistematis dari Administrasi Negara Perbandingan tersebut. Setelah diselenggarakan konferensi tersebut tahun 1952, perhatian terhadap Perbandingan Administrasi Negara semakin meningkat terbukti semakin banyaknya karya tulis dalam bidang tersebut dipelopori William J. Siffin (1957), dan sejak 1957 itulah hingga kini Ilmu Perbandingan Administrasi Negara terus mengalami perkembangannya. Istilah Perbandingan dalam Ilmu Administrasi Negara Perbandingan, terkandung pengertian mengajarkan serta menarik segi persamaan dan/ perbedaan dari gejala/fenomena/sasaran. Sedangkan Administrasi dalam pengertian yang lazim khususnya tentang Administrasi Negara dan Ilmu Politik umumnya, dimaksudkan sebagai salah satu gejala kehidupan dalam masyarakat yaitu sekelompok manusia/warga negara beraktivitas untuk mewujudkan tujuan tertentu. Dalam hubungan dengan kata perbandingan timbul berbagai penafsiran.

METODE

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Internet Searching atau studi pustaka. Internet Searching adalah proses pencarian data melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel ataupun perundang-undangan secara online yang berkaitan objek penelitian.

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui jurnal penelitian, internet, buku dan e-book yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

HASIL

Dalam studi Perbandingan Administrasi Negara terkandung aspek yang relevan, yakni Administrasi Negara? Administrasi Negara dengan pengertian umum tentang bagaimana lembaga Negara tumbuh dan hidup dalam negara menjalankan fungsinya. Administrasi Negara bukan merupakan bidang studi yang memiliki pengertian serta sifat umum dan berdiri sendiri, tetapi merupakan bidang studi yg tidak diterapkan dalam negara dengan multidisipliner atau Administrasi Negara pada hakekatnya merupakan salah satu aspek dari Administrasi yang menekankan pembahasannya pada bidang kenegaraan atau publik. Unsur-unsur Administrasi yang merupakan induk Administrasi Negara merupakan proses penyelenggaraan Kerja sama yang

dilakukan oleh lebih dari satu orang Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pengertian Administrasi Negara mengandung pengertian kolektif meliputi segenap proses penyelenggaraan negara sebagai orang yang terdiri dari lembaga-lembaga beserta fungsi masing-masing yang tumbuh dan hidup dalam negara dan semuanya diarahkan mencapai tujuan negara. Setiap negara tidak menggunakan cara yang sama, juga yang menjadi tuntutan/cita-cita dari warga negara, hal ini didasarkan kepada kebutuhan masing-masing negara sebagai konsekuensi logis adanya perbedaan kebutuhan tersebut. Dengan demikian terdapat perbedaan pula dalam pengaturan Administrasi Negara di masing-masing Negara. Baik dalam mempersiapkan alat pelengkap sebagai sarana pencapaian tujuan.

Selama berabad-abad untuk memahami dan menjelaskan perbedaan prosedur serta bekerjanya berbagaimacam sistem politik, para teoritis telah membandingkan. Ahliilmu politik berusaha menemukan kondisi-kondisi yang ada dalam masing-masing negarayang menjadi objek risetnya untuk menjelaskan faktor yg menyebabkan perbedaan. Dalam membandingkan lembaga dan proses itu biasanya dilalui tahap tertentu.

Suatu sistem adalah seperangkat komponen, elemen, unsur atau subsistem dengan segala atributnya, yang satu sama lain saling berkaitan, pengaruh-mempengaruhi dan saling tergantung hingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi atau suatu totalitas, serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu. Sebagai suatu sistem, administrasi merupakan sistem yang bersifat:

1. Abstrak, karena tidak dapat dikenali wujud rupanya.
2. Buatan manusia (*man made systems*).
3. Terbuka (*open systems*), karena peka terhadap pengaruh lingkungan, baik sosial maupun fisik.
4. Hidup (*living systems*), berkembang terus akibat sifat terbukanya.
5. Kompleks, karena di dalamnya terdapat banyak subsistem.

Administrasi negara pada hakikatnya merupakan proses penyelenggaraan kebijaksanaan negara atau pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, maka sesuai dengan sistem pemerintahan negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan administrasi negara yaitu keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara Indonesia dengan memanfaatkan segala kemampuan aparatur negara demi terciptanya tujuan Nasional.

Penyempurnaan administrasi negara Indonesia secara sungguh-sungguh telah dimulai sejak tahun 1966 dengan dibentuknya Tim Pembantu Presiden untuk Penyempurnaan Aparatur dan Administrasi Pemerintah (Tim PAAP) dengan Keppres No. 266 Tahun 1966 yang antara lain telah menghasilkan penataan kembali kedudukan dan hubungan antar lembaga-lembaga negara, penertiban susunan organisasi dan pembagian tugas-tugas pada Departemen dengan Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/Kep/8/1966 dan No. 75/U/Kep/11/1966. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan administrasi negara Republik Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara, keuangan dan lembaga-lembaga negara untuk mewujudkan tujuan Republik Indonesia. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia ialah Jakarta.

Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara unikameral, namun setelah amendemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi dan komposisi keanggotaannya juga berubah. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun demikian, Presiden saat ini yakni Joko Widodo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh menteri tanpa

portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya). Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amendemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan.

Menurut definisi resminya, RRT merupakan suatu negara komunis karena ia memang merupakan negara komunis pada abad ke-20 yang lalu. Secara resmi ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya lagi sebagai negara komunis. RRT juga begitu berhasil menghalangi gerakan informasi, dan ada masanya mereka terpaksa mengganti polisi mereka sebagai tindakan balas terhadap protes rakyat. Walaupun penentangan berstruktur terhadap PKT tidak dibenarkan sama sekali, demonstrasi rakyat semakin lama semakin kerap dan dibiarkan. Popularitas Partai di kalangan rakyat sukar diukur, karena tiada pemilu di tingkat nasional, dan apabila orang Tiongkok ditanya secara sendirinya pula, ada sebagian yang menyokong dan ada pula yang membangkang, namun sebagian besar menolak mengomentari masalah politik. Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apa pun. Antara masalah-masalah politik yang utama di Tiongkok adalah kesenjangan sosial di antara kaya dan miskin dan gejala suap yang berlaku karena biokrasi pemerintahan. Terdapat juga partai politik yang lain di RRT, walaupun mereka hanya sekadar sub-partai atau partai yang rapat dengan PKT. PKT mengadakan dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang dinamai Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat Tiongkok yang dipertimbangkan RRT. Cara ini lebih disukai pemerintahan dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak memberi kesan apa pun terhadap polisi dan dasar-dasar kerajaan. Fungsi badan perhubungan khusus ini lebih kepada mata luaran CPP, walaupun terdapat pengawai badan ini di semua tingkat pemerintahan.

DISKUSI

Mengenai pembahasan tentang sistem administrasi negara Indonesia dengan China, maka ada beberapa perbedaan atau perbandingan yang bisa kita peroleh, yaitu:

1. Kesejahteraan rakyat
 - a) Republic Rakyat China (RRC)

Pemerintah RRC berpendapat bahwa hak asasi manusia sepatutnya mencakup kepuasan hidup dan kemajuan ekonomi. Dengan kata-kata berlainan, saat mengkaji dirinya, termasuk melihat kemajuan ekonomi dan kepuasan hidup rakyatnya sebagai meningkatkan situasi hak asasi manusianya, dan saat melihat situasi di Negara-negara maju seringkali menotakan terdapat tingkat kriminalitas dan kemiskinan yang tinggi di tempat-tempat yang dikatakan mempunyai penghormatan terhadap hak asasi manusia yang tinggi. Praktek melihat HAM seperti ini, diamalkan di kebanyakan negara timur yang lain. Negara China memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyatnya karena upaya tersebut di mulai dari tingkat masyarakat yaitu petani dan pengrajin. Di negara China bambu di sihir menjadi sebuah pernak – pernik kerajinan yang unik dan mempunyai daya pikat, serta dapat di jadikan sebagai pengobatan infeksi, dan menurut pengobatan tradisional China bambu mengandung sumber pottasium yang rendah kalori, rasa manis nya terkenal sebagai sumber protein dan nutrisi yang baik.

- b) Indonesia

Setelah memberi catatan pada penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin dan menengah, tiba waktunya memberi catatan atas penduduk Indonesia yang tergolong menengah-atas (3,6%, dibulatkan ke atas menjadi: 4%) dan atas (1%). Data yang berasal dari BPS dan Litbang Kompas tidak satu pun menjelaskan berapa batasan penghasilan (atau pengeluaran) bulanan kelompok ini). Bila kelas menengah berpenghasilan Rp 1,9 sebulan, maka secara statistik kita bisa menggolongkan bahwa kelas menengah-atas berpenghasilan di atas Rp 1,9 juta per bulan. Karena tidak ada rincian data pendapatan kelas itu, saya tetapkan menurut

pertimbangan sendiri bahwa kelas menengah-atas adalah penduduk Indonesia yang rentang penghasilan sebulannya berkisar Rp 1,9 juta hingga Rp 12 juta. Sedangkan kelas atas adalah mereka yang pendapatannya di atas Rp 12 juta. Acuan pertimbangan saya adalah pendapatan yang mungkin diterima oleh lulusan S1 (sederajat) yang masuk golongan III-A PNS pada tahun awal bekerja. Gayus, misalnya, tamatan S1 yang baru 1 tahun bekerja di kantor pajak, gaji resminya (setelah renumerasi di lingkungan Kemkeu) adalah Rp 12 juta per bulan. Golongan III-A adalah golongan yang memungkinkan seseorang menduduki level pimpinan, berpendapatan besar, dan menjadi kelas atas di kemudian hari. Kalau diperhatikan lebih mendalam lagi, sebetulnya orang yang pendapatannya di atas Rp 12 juta. belum juga bisa disebut kaya sekali. Maka, jika ingin lebih mendekati kenyataan, kelas atas pun harus dibagi lagi dalam beberapa segmen.

Namun, karena jumlah penduduk Indonesia adalah 240 juta jiwa, maka 5% berarti setara dengan 12 juta jiwa. Jumlah yang lebih dari cukup untuk menggerakkan roda ekonomi nasional, sekaligus menjadi kelompok penikmat utama hasil-hasil pembangunan, istimewa bagi yang masuk kelas atas yang cuma 1%. Maka, tidak perlu heran bila Indonesia yang 95% penduduknya masuk kelompok miskin-menengah, mampu menyajikan pemandangan harian seperti ini: Apartemen senilai Rp 5-10 miliar laris manis setiap kali launching, mobil mewah impor berseliweran di tengah kemacetan ibu kota, area parkir mal terkenal dipastikan penuh sesak oleh mobil-mobil berkelas dan terbaru. Indonesia menjadi salah satu penghasil bahan baku rotan dan bambu terbesar di dunia setelah negara China. Ini terbukti dari banyaknya permintaan bambu dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Prancis, Australia dll. Produk bambu di Indonesia sangat di minati pasar di Amerika Serikat, Jerman, Australia, Jepang dan Prancis karena kualitasnya yang bagus. Sebenarnya kerajinan-kerajinan buatan orang Indonesia tidak kalah bagusnya dengan produk kerajinan negara China. Karena kurangnya minat untuk memanfaatkan bambu maka produksinya pun sedikit. Seharusnya pemerintah lebih gencar menjadikan bambu kepada masyarakat sebagai usaha ekonomi kreatif yang mampu mengatasi angka pengangguran setiap tahunnya. Karena bambu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia terutama masyarakat di pedesaan.

Perlu diketahui bahwa di Indonesia itu sendiri bambu-bambu dimanfaatkan untuk berbagai macam kerajinan tangan dan makanan yang mempunyai nilai jual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Antara lain yaitu sebagai kuliner, tunas pohon bambu merupakan sayuran yang populer dan bernilai ekonomis. Selain itu orang Indonesia memanfaatkan bambu untuk peralatan rumah tangga yang sebelum datangnya peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik. Diantaranya yaitu tempat nasi (boboko), tampah, tempat sampah, kipas, besek, topi bambu (caping), wayang bambu dan lain-lain. Selain itu juga bambu dibuat mereka menjadi sebuah alat musik tradisional seperti seruling dan angklung yang berasal asli dari daerah Sunda. Dari pemanfaatan bambu itu lah masyarakat bisa memperoleh keuntungan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di tangan para pengrajin lah bambu-bambu di anyam dan di sulap menjadi sebuah kerajinan yang mempunyai nilai jual tinggi, dan produk dari bahan baku bambu di Indonesia kini sampai menembus pasar internasional.

2. Politik

a) Politik Negara Indonesia

Republik Indonesia (RI), biasa disebut Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi lebih dari 258 juta jiwa pada tahun 2016, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang

berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 207 juta jiwa. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia ialah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India. Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara unikameral, namun setelah amendemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi dan komposisi keanggotaannya juga berubah. MPR setelah amendemen UUD 1945, yaitu sejak 2004 menjelma menjadi lembaga bikameral yang terdiri dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan wakil rakyat melalui Partai Politik, ditambah dengan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan wakil provinsi dari jalur independen. Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik untuk masa jabatan lima tahun. Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan dan TNI/Polri. MPR saat ini diketuai oleh Zulkifli Hasan. DPR saat ini diketuai oleh Ade Komarudin, sedangkan DPD saat ini diketuai oleh Mohammad Saleh. Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun demikian, Presiden saat ini yakni Joko Widodo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh menteri tanpa portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya). Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amendemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan.

b) Politik Negara China

Menurut definisi resminya, RRT merupakan suatu negara komunis karena ia memang merupakan negara komunis pada abad ke-20 yang lalu. Secara resmi ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya lagi sebagai negara komunis. Tiada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang diamalkan negara ini, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu sebab masalah ini ada adalah karena sejarahnya, Negara Tiongkok merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Konfusianisme. Setelah era monarki berakhir pada tahun 1911, Tiongkok diperintah secara otokratis oleh Partai Nasionalis Kuomintang dan beberapa panglima perang. Kemudian setelah 1949 pemerintahan dilanjutkan oleh Partai Komunis Tiongkok. Pemerintah RRT sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis. Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis. Memang, negara Tiongkok semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini, pemerintah menggariskan administrasi negara yang demokratis, meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu. Pemerintah RRT dikawal oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan pemimpin negara dipilih langsung oleh Partai melalui Kongres.

Walaupun terdapat sedikit banyak gerakan ke arah liberalisasi, seperti pemilihan umum yang sekarang diadakan di tingkat desa dan sebagian badan perwakilan, partai ini terus memiliki mengawasi, terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun negara menggunakan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, pada masa yang sama pemerintah juga mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan tunjuk perasaan pribadi, dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintah secara lebih adil. Penyaringan terhadap dakwah-dakwah politik juga rutin, dan RRT secara tegas menghapuskan protes atau organisasi apa pun yang dianggapnya berbahaya terhadap pemerintahannya, seperti yang terjadi di Demonstrasi Tiananmen pada tahun 1989. Akan tetapi, media republik rakyat ini semakin aktif menyiarkan masalah sosial dan menghebohkan gejala 'penyogokan' di peringkat bawahan pemerintahan.

RRT juga begitu berhasil menghalangi gerakan informasi, dan ada masanya mereka terpaksa mengganti polisi mereka sebagai tindakan balas terhadap protes rakyat. Walaupun penentangan berstruktur terhadap PKT tidak dibenarkan sama sekali, demonstrasi rakyat semakin lama semakin kerap dan dibiarkan. Popularitas Partai di kalangan rakyat sukar diukur, karena tiada pemilu di tingkat nasional, dan apabila orang Tiongkok ditanya secara sendirinya pula, ada sebagian yang menyokong dan ada pula yang membangkang, namun sebagian besar menolak mengomentari masalah politik. Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apa pun. Antara masalah-masalah politik yang utama di Tiongkok adalah kesenjangan sosial di antara kaya dan miskin dan gejala suap yang berlaku karena biokrasi pemerintahan. Terdapat juga partai politik yang lain di RRT, walaupun mereka hanya sekadar sub-partai atau partai yang rapat dengan PKT. PKT mengadakan dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang dinamai Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat Tiongkok yang dipertimbangkan RRT. Cara ini lebih disukai pemerintahan dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak memberi kesan apa pun terhadap polisi dan dasar-dasar kerajaan. Fungsi badan perhubungan khusus ini lebih kepada mata luaran CPP, walaupun terdapat pegawai badan ini di semua tingkat pemerintahan.

3. Kualitas Pelayanan Publik

Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari

penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan public.

Undang-Undang ini berasaskan pada kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dan bertujuan agar batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, menjalankan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Organisasi Penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan. Pemerintah mengandung arti suatu kelembagaan atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Penguasa dalam hal ini pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan penyelenggaraan kepentingan umum, yang dijalankan oleh penguasa administrasi negara yang harus mempunyai wewenang. Seiring dengan perkembangan, fungsi pemerintahan ikut berkembang, dahulu fungsi pemerintah hanya membuat dan mempertahankan hukum, akan tetapi pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi berfungsi juga untuk merealisasikan kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum (public service). Perubahan paradigma pemerintahan dari penguasa menjadi pelayanan, pada dasarnya pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa.

Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. Dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya yang diselenggarakan oleh pemerintah semata tetapi juga oleh penyelenggara swasta. Sudah sepatutnya pemerintah mereformasi paradigma pelayanan publik tersebut. Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah penggeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, tak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain sesegera mungkin mendengarkan suara publik itu sendiri. Inilah yang akan menjadi jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik. Pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Di mana hal ini juga sebagai akibat dari berbagai permasalahan pelayanan publik yang belum dirasakan oleh rakyat. Di samping itu, ada kecenderungan adanya

ketidakadilan dalam pelayanan publik di mana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit mendapatkan pelayanan. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki “uang“, dengan sangat mudah mendapatkan segala yang diinginkan. Untuk itu, apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus-menerus terjadi, maka pelayanan yang berpihak ini akan memunculkan potensi yang bersifat berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Potensi ini antara lain terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antar yang kaya dan miskin dalam konteks pelayanan, peningkatan ekonomi yang lamban, dan pada tahapan tertentu dapat meledak dan merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Birokrasi pada pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan publik sering atau selalu dikeluhkan karena tidak efisien dan efektif, birokrasi sering kali dianggap tidak mampu melakukan hal-hal yang sesuai dan tepat, serta sering birokrasi dalam pelayanan publik itu sangat merugikan masyarakat sebagai konsumennya. Hal ini sangat memerlukan perhatian yang besar, seharusnya birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu memudahkan masyarakat menerima setiap pelayanan yang diperlukannya, seharusnya pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan terhadap masyarakat itu mempermudahkannya, bukan mempersulit. Penyelenggaraan pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik, pemerintahan yang baik cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan publik dengan baik pula, sebaliknya pemerintahan yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak dapat terselenggara dengan baik. Dalam hal ini juga pemerintah diperbolehkan untuk melakukan intervensi dalam kehidupan masyarakat dengan konsep negara kesejahteraan (welfarestaat) melalui instrumen hukum yang mendukungnya, hal ini boleh dilakukan agar dapat terlaksananya pelayanan publik dengan baik serta terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai konsumen dalam pelayanan publik welfarestaat ini sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara dalam pelayanan publik. Sistem pemerintahan yang baik adalah partisipasi, yang menyatakan semua institusi governance memiliki suara dalam pembuatan keputusan, hal ini merupakan landasan legitimasi dalam sistem demokrasi, good governance memiliki kerangka pemikiran yang sejalan dengan demokrasi dimana pemerintahan dijalankan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintah yang demokratis tentu akan mengutamakan kepentingan rakyat, sehingga dalam pemerintahan yang demokratis tersebut penyediaan kebutuhan dan pelayanan publik merupakan hal yang paling diutamakan dan merupakan ciri utama dari good governance.

4. Daya Saing Global

Dibanding negara-negara yang sekarang disebut 'macam baru perekonomian' seperti Cina, Korea Selatan, Taiwan dan India, daya saing teknologi Indonesia relatif ketinggalan termasuk jika disandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Padahal menurut direktur Riset di Indonesia Strategic Institute Ridwansyah Yusuf Achmad, Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah. Perbedaan aspek perekonomian Indonesia dan China yaitu sebagai berikut :

a) Biaya bahan mentah dan biaya produksi

Indonesia = Walaupun kaya akan SDA, namun untuk produksi tertentu ada bahan baku yang harus impor dari luar negeri, padahal potensi input dalam negeri bisa dioptimalkan.

China = Biaya bahan mentah rendah, hal ini membuat biaya produksi murah dan produksi efisien (economies of scale).

b) Pola konsumsi

Indonesia = Cenderung konsumtif dan lebih suka beli barang impor dari pada yang diproduksi oleh negara sendiri, tidak peduli harganya mahal atau tidak karena gengsi.

China = Masyarakatnya mengkonsumsi barang yang dihasilkan sendiri. Mereka tidak ingin membeli yg impor karena mahal.

c) Distribusi pendapatan

Indonesia = Masih banyak terdapat kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin, tingkat pendapatan antar daerah juga timpang.

China = Distribusi pendapatan yang merata, dikarenakan perencanaan ekonomi yang terpusat.

d) Arus perdagangan ekspor impor

Indonesia = Ekspor Indonesia cukup signifikan untuk beberapa komoditas, namun impornya juga besar, sehingga net surplusnya kecil bahkan sampai ada yang defisit.

China = Produksi massal dengan biaya murah membuat China sebagai eksportir terbesar dunia saat ini.

e) Nilai tukar dan Daya beli

Indonesia = Nilai tukar rupiah cukup stabil dengan peningkatan daya beli dan konsumsi kelas menengah, akan tetapi daya beli tidak merata di setiap daerah

China = Nilai tukar yang baik diimbangi dengan daya beli, namun ekonomi China lebih ditunjang oleh ekspor, bukan konsumsi

f) Tenaga kerja

Indonesia = Penduduk Indonesia juga banyak, akan tetapi keunggulan komparatif dalam upah murah telah kalah bersaing.

China = Jumlah penduduk yang sangat banyak menjadikan China memiliki upah buruh yang murah.

5. Kinerja Birokrasi

a) Republik Rakyat China (RRC)

Reformasi dalam birokrasi merupakan keharusan karena jika birokasinya sudah tepat maka birokrasi bisa menjungkirkan penguasa. Birokrasi bisa mempunyai kekuasaannya sendiri. Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah wewenang dari peraturan perundang-undangan. Dalam birokrasi terdapat dua pilar yaitu Budaya dan Aturan. Salah satu contoh reformasi birokrasi adalah reformasi birokrasi di negara China. Kegagalan total yang melanda China pada tahun 1959, 1960, dan 1961 yang tengah melakukan revolusi kebudayaan membuat pemerintah China mereformasi sistem birokasinya. Perubahan terjadi pada tahun 1978 setelah terjadinya konsolidasi politik di bawah Deng Xiaoping. Di bawah pemerintahannya, para pemimpin tidak boleh terlalu berketat pada ideologi komunis, tetapi juga pada pengembangan ekonomi. Dengan terjadinya konsolidasi politik, pemerintah China bisa kembali memainkan peranannya soal perekonomian. Programnya dimulai dari reformasi sektor pertanian, dimana petani boleh memilih dan memproduksi komoditas yang akan ditanam, dan reformasi selanjutnya di sektor industri dan jasa. Selain itu juga pemerintah China membuat beberapa kebijakan-kebijakan dalam reformasi birokasinya.

Pada tahun 1979 China memutuskan meliberalisasikan sektor keuangan dengan memanfaatkan kehadiran bank. Dana pembangunan yang sebelumnya mengandalkan alokasi anggaran pemerintah, mulai diserahkan ke lembaga perbankan, yang juga merupakan bagian dari pengenalan kepada mekanisme pasar yang relatif lebih efektif soal alokasi kredit. Selain itu pemerintah melakukan desentralisasi wewenang terhadap pemerintah lokal untuk mengembangkan perekonomian setempat, diluncurkannya hukum dengan mengizinkan swasta memiliki perusahaan, dan diluncurkannya kebijakan persaingan, untuk menarik investasi asing langsung sehingga menurunkan tarif impor, menghapus monopoli BUMN dalam ekspor dan mengakhiri sistem kurs mata uang ganda.

Pada tahun 2001 arah perekonomian dengan menggunakan model mekanisme pasar dilanjutkan dengan menjadi anggota WTO. Pada tahun 2004 ditekankan peran non-BUMN sebagai basis utama perekonomian dengan adanya peraturan baru untuk melindungi pengambilalihan aset swasta. Pada tahun 2005 sektor swasta bebas bisnis diinfrastruktur, jasa umum dan keuangan, yang sebelumnya dilarang. Selain

reformasi di atas terdapat juga reformasi nonekonomi yaitu, pendidikan dimana semua warga mendapatkan pendidikan dasar sembilan tahun dan jumlah murid yang memasuki pendidikan tinggi naik 3,5 kali pada 2003 dengan penekanan lebih kuat pada pendidikan teknik. Upah pekerja membaik karena kegiatan ekonomi makin besar. Kemudian, diluncurkan pula kebijakan tentang pengurangan pajak dan pemberantasan pungutan liar di pedesaan untuk menaikkan pendapatan.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa China berhasil reformasi birokrasi. Berhasilnya reformasi birokrasi di China, dengan perubahan di sektor budaya dan aturan, dapat dijadikan contoh bagi Indonesia untuk mengatasi masalah reformasi birokrasi yang selama ini belum terselesaikan dengan tuntas.

b) Indonesia

Dalam perkembangannya pengorganisasian birokrasi mulai diwarnai dengan ketidakpastian akibat peranan partai-partai politik yang saling bersaing dengan sangat dominan, partai-partai politik mulai melakukan building block kekuasaan melalui pos-pos kementerian strategis di jajaran pemerintahan sebagai sumber daya kelangsungan partai politik yang bersangkutan, program rekrutmen birokrasi ikut mengalami spoil system yang merajalela mulai dari pengangkatan, penempatan, promosi dan instrumen kepegawaian lainnya tidak didasarkan kriteria penilaian melainkan berdasarkan pertimbangan politik, golongan serta unsur-unsur lainnya diluar tugas birokrasi.

Ketika Suharto pertama kali membentuk Kabinet Pembangunan I dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968, dibentuk kementerian nomenklatur baru yaitu Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negarabertugas antara lain melanjutkan pembersihan birokrasi dari unsur-unsur apa yang disebut dengan berpolitik kepartaian lalu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 pada tanggal 29 Nopember 1971 didirikan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai organisasi wadah tunggal bagi seluruh pegawai pemerintahan Indonesia dan dalam perkembangan selanjutnya Tim PAAP dan Proyek 13 akhirnya dilebur kedalam Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara sedangkan Sektor Aparatur Pemerintah (Sektor P) tetap dan berfungsi meliputi penyusunan kebijaksanaan, perencanaan, pembuatan program, koordinasi, pengendalian, dan penelitian dalam rangka menyempurnakan dan membersihkan aparatur negara dan Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara yang dipimpin oleh seorangan menteri merangkap menjadi anggota Sektor N (Penelitian dan Pengembangan) dan Sektor Q (Keamanan dan Ketertiban) dan dengan Keppres Nomor 45/M Tahun 1983 Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara diubah kembali menjadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negarayang secara langsung menteri pada kementerian tersebut merangkap pula sebagai wakil Ketua Bappenas. Tahun 1995 melalui Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tanggal 27 September 1995 pemerintah mencanangkan dimulai diterapkan lima hari kerja yaitu hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1995 sebagai akibat dari sistem pembinaan Karier PNS, pertumbuhan nol pegawai negeri sipil (PNS) (Zero Growth) seta perampingan organisasi. Setelah tahun 1998 yang dikenal sebagai gerakan reformasimaka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 mengenai keberadaan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai anggota partai politik lalu diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 yang membuat pegawai negeri sipil (PNS) kembali tertutup dari kemungkinan untuk ikut berkiprah sebagai keanggotaan dalam partai politik apapun.

KESIMPULAN

Ada kekurangan dan kelebihan dari setiap Negara, akan tetapi untuk Negara Indonesia tersendiri harus lebih belajar dan berusaha untuk menjadi Negara maju. Faktor pendidikan terutama modal bangsa Indonesia yang masih kurang. Negara China yang bisa disebut birokrasi reformasi yang bagus, patut di contoh untuk penerapan di Indonesia. Indonesia, masih banyak terdapat kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin, tingkat pendapatan antar daerah juga timpang. China. Distribusi pendapatan yang merata, dikarenakan perencanaan ekonomi yang terpusat. China telah memberikan pelajaran yang sangat berharga mengenai bagaimana seharusnya Negara mampu bertindak dan berperan dalam ekonomi politik global sekarang ini.

Bangsa China selalu khawatir bahkan takut akan serbuan-serbuan produk China yang murah, tetapi kualitas cukup baik. Disini Negara mampu menaikkan perusahaan yang efektif dalam menjaga integrasi pasar untuk selalu dalam skala relatif yang disesuaikan dengan kondisi dan tidak menyerahkan sepenuhnya kepada totalitas pasar. Di Indonesia mestinya bisa mengambil pelajaran seperti itu, para elit negara tersebut mempunyai pola pikir yang layak di jadikan pelajaran, legiminasi pemerintah harus dibangun melalui usaha bagaimana meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Pandangan tersebut penting diperhatikan karena kebijakannya politik pemerintah di Indonesia lebih berpihak pada kooporasi-kooporasi besar, kebijakan – kebijakan yang di ambil cenderung pragmatis demi melakukan pelanggaran kekuasaan lima tahun kedepan. Hal yang telah bisa kita ambil pula adalah bagaimana mampu memupuk nasionalisme dalam keseluruhan proses kebijakan publik ketika negara tersebut mengintegrasikan diri dalam perekonomian global.

DAFTAR PUSTAKA

- Imania, Ayu. 2023. *Perbandingan Administrasi Negara*. Tersedia: https://www.academia.edu/9703519/Perbandingan_adm_negara. [Mei 2023].
- Wati, Risma, dkk. 2023. *Analisis Perbandingan Administrasi Publik Negara China dan Rusia*. Tersedia: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mo d/resour ce/view.php%3Fid%3D101629&ved=2ahUKEwiz45-gnIz_AhUt3jgGHdKGAXkQFnoECA8QBg&usg=AOvVaw3ts9eL-E60MFtf55oSE5Qj. [Mei 2023].
- Aryono, Eko, dkk. 2016. *Perbandingan Negara Indonesia Dengan China*. Tersedia: <https://id.scribd.com/document/334857903/Tugas-Perbandingan-Pemerintahan-Indonesia-vs-China>. [Mei 2023].